

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Sebagaimana penelitian penulis yang berjudul “Pembangunan Kampung Keramat Berbasis *Collaborative Governance*”, perlu kiranya kita untuk memahami peneliti terdahulu sebagai acuan dasar dalam penelitian penulis. Hal ini dilakukan agar penelitian penulis mendapatkan keabiasaan data, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kedepannya. Berikut adalah paparan mengenai peneliti terdahulu terkait “*Collaborative Governance*” sebagai berikut :

#### A. Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Teori atau Pendekatan Konsep	Hasil Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Peneliti
1.	Mira Janu Yustiti. 2018. Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Objek Wisata Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara <sup>37</sup>	Penelitian deskriptif dan pendekatan Kualitatif  Teori yang digunakan adalah Teori Collaborative Governance	Dalam pengelolaan wisata Gili Trwawangan, melibatkan stakeholder pemerintah, swasta, maupun Masyarakat. Hasil kolaborasi yang telah dibangun adalah terjadi Kolaborasi dalam pengelolaan event Gili Festival dan Promosi Wisata. Namun yang menjadi kendalanya adalah komunikasi dan koordinasi yang masih kurang dianatara stakeholder yang terlibat.	Perbedaannya adalah terletak pada pelaksanaan kerjasamanya. Kalau dalam penelitian Mira Janu Yustiti kerjasama yang dibangun terfokus dalam pengelolaan Wisata Gili Trawangan. Sedangkan dalam penelitian penulis sendiri fokus kerjasama yang dibangun lebih kepada pengembangan Kampung Keramat

<sup>37</sup> Mira Janu Yustiti. 2018. Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Objek Wisata Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara. Diakses tanggal 5 februari 2019. [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&ty p=html&buku\\_id=128882&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&ty p=html&buku_id=128882&obyek_id=4)

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Teori atau Pendekatan Konsep	Hasil Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Peneliti
2.	Mia Fairuza. 2017. Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Wisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi) <sup>38</sup>	Penelitian Deskriptif dan Pendekatan Kualitatif	Dalam pembangunan Inklusif pada sektor wisata pulau merah di kabupaten banyuwangi, bahwa telah terjadi koaborasi antar stakeholder Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Perum Perhutani dan Masyarakat Lokal. Kolaborasi yang terbentuk adalah dalam konteks Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Pulau Merah. Adapaun kendalanya adalah terdapat konflik terkait pembagian hasil dari sektor wisata pulau merah yang menurut masyarakat kurang adil.	Perbedaannya adalah terletak pada stakeholder yang terlibat dalam proses kerjasama. kerjasama yang dibangun dalam penelitian Mia Fairuza ada 2 stake holder , yakni stake holder pemerintah dari pihak Pemerintah Daerah dan Perum Perhutani, kemudian dari pihak masyarakat lokal sendiri. Sedangkan dalam penelitian penulis kerjasama yang dibangun menghadirkan tiga stake holder, yakni Masyarakat, Pemerintah dan Swasta.
3.	Bagus Nuari Harmawan, Inti Wasiati, dan Hermanto Rohman. 2017. Collaborative Governance dalam	Penelitian Deskriptif dan Pendekatan Kualitatif  Teori <i>Collaborative Governance</i>	Dalam Progam Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i> telah teradi Kolaborasi stakeholder yang terlibat, yakni	Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Nuari Harmawan, Inti Wasiati, dan Hermanto Rohman dengan

<sup>38</sup> Mia Fairuza. 2017. Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Wisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). Diakses Tanggal 5 februari 2019. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp27a31822dffull.pdf>.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Teori atau Pendekatan Konsep	Hasil Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Peneliti
	Progam Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui <i>Banyuwangi Ethno Carnival</i> (Collaborative Governance in <i>Local Culture Values Development</i> Progam Through Banyuwangi Ethno Carnival) <sup>39</sup>		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Manajemen <i>Jember Fashion Carnival</i> , Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi, dan Dewan Kesenian Blambangan. Namun kelemahannya adalah kolaborasi tersebut bersifat <i>Public Private Partnership</i> (Kerjasama Pemerintah dan swasta).	penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan. Dari segi kerjasama yang dibangun sama-sama berfokus dalam pengembangan. Sedangkan dari stakeholder yang terlibat memiliki kesamaan, ada tiga pihak yang terlibat yakni pemerintah, Swasta dan Masyarakat
4.	Rintan Mirza Diani dan Yoanes Kevin Gratianus Simbolon. 2017. Analisis Penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour <sup>40</sup>	Penelitian Deskriptif dan Pendekatan Kualitatif  Teori <i>Collaborative Governance</i>	Dalam Pengelolaan Wisata Bencana Lava Tour, telah terjadi proses Koaborasi diantara berbagai stakeholder antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Travel Tour, dan masyarakat Lokal. Dalam proses kolaborasi tidak terjadi kendala apapun, karena pembagian tugas sudah terstruktur dengan baik	Perbedaannya adalah terletak pada fokus kerjasama yang dibangun. Kerjasama yang dibangun dalam penelitian Rinta Mirza Diani dan Yoanes Kevin Gratianus lebih kepada pengelolaan Wisata Bencana Lava Tour.

<sup>39</sup> Bagus Nuari Harmawan, Inti Wasiati, dan Hermanto Rohman. 2017. Collaborative Governance dalam Progam Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui *Banyuwangi Ethno Carnival* (Collaborative Governance in *Local Culture Values Development* Progam Through Banyuwangi Ethno Carnival). Diakses Tanggal 5 februari 2019. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/5615>

<sup>40</sup> Rintan Mirza Diani dan Yoanes Kevin Gratianus Simbolon. 2017. Analisis Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. Diakses Tanggal 5 Februari 2019. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/9858>.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Teori atau Pendekatan Konsep	Hasil Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Peneliti
			dan koordinasi pun juga dilakukan dengan baik dan lancar.	Sedangkan penelitian penulis fokus kerjasama yang dibangun lebih kepada Pengembangan Kampung Wisata Tematik Kampung Keramat.
5.	Giat Tri Sambodo dan Ulung Pribadi. 2016. Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta <sup>41</sup>	Penelitian Deskriptif dan Pendekatan Kualitatif  Teori <i>Collaborative Governance</i>	Dalam Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> di Desa Budaya Brosot telah terjadi kolaborasi antar berbagai aktor yang terlibat, diantaranya adalah Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Kolaborasi tersebut seringkali tersebut pada saat forum Arisan dan Rapat. Kolaborasi tersebut juga terbentuk melalui kepanitiaan pada saat perayaan event budaya seperti Merti Desa, 17an, Upacara Tradisi, Festival Desa Budaya, dan Festifal Bentara Upacara.	Perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Griat Tri Sambodo dan Ulung Pribadi fokus kerjasama yang dibangun adalah dalam pelaksanaan kepanitiaan pada saat perayaan event Budaya yang dilaksanakan di desa tersebut. sedangkan dalam penelitian penulis fokus kerjasama yang dibangun adalah dalam hal pengembangan wisata Tematik kampung keramat.

<sup>41</sup> Giat Tri Sambodo dan Ulung Pribadi. 2016. Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. Diakses Tanggal 5 Februari 2019. <http://journal.umsida.ac.id/index.php/GPP/article/view/2140>



No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Teori atau Pendekatan Konsep	Hasil Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Peneliti
6.	Tito Handoko, Syofian dan M.Y Tiyas Tinov. 2018. <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota Pekanbaru <sup>42</sup>	Penelitian Deskriptif dan Pendekatan Kualitatif  Teori <i>Collaborative Governance</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan program pengendalian lingkungan DAS Siak Kota Pekanbaru melibatkan berbagai aktor, diantaranya adalah Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Industri. Kolaborasi ini terjadi pada sebuah forum musyawarah sebelum pembuatan UKL dan UPL. Namun kendalanya adalah pasca pembuatan tersebut pemerintah dan pihak industri tidak lagi terlibat.	Perbedaanya adalah terletak pada fokus kerjasama yang dibangun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tito Handoko dan M.Y Tiyas Tinov fokus kerjasama yang dibangun adalah pada pelaksanaan program Pengendalian Lingkungan DAS Siak. Sedangkan dalam penelitian penulis sendiri fokus kerjasama yang dibangun terletak pada pengembangan khususnya di wisata tematik Kampung Keramat.

Berdasarkan peneliti terdahulu diatas menjelaskan bahwasannya collaborative Goovernance dari berbagai kasus yang ada sangatlah diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan yang ada di setiap sektor. begitupun juga dalam ruang lingkup pembangunan kampung keramat. Kerjasama sangatlah diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembangunan kampung keramat. Dari sinilah perlunya keterlibatan setiap

<sup>42</sup> Tito Handoko, Syofian dan M.Y Tiyas Tinov. 2018. *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota Pekanbaru. Diakses Tanggal 5 Februari 2019. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/1904/1448>

aktor dalam pembangunan tersebut sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Jika kita lihat dengan seksama dari berbagai penelitian terdahulu tersebut pelaksanaan collaborative governance juga sangat beragam dalam berbagai kasus dan sektor. sebagai contohnya pada penelitian Mira Janu Yustiti terdapat pelaksanaan collaborative governance dalam pengelolaan wisata gili trawangan sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tito Handoko, Syofian dan M.Y Tiyas Tinov bahwasannya dalam penelitiannya tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota Pekanbaru terdapat proses collaborative governance dalam pengendalian pencemaran lingkungan tersebut.

Dari kedua contoh tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan collaborative governance sangatlah beragam ketika ditinjau dari berbagai kasus dan sektor yang ada. Adapun penelitian penulis tentang pembangunan kampung keramat berbasis Collaborative Governance. Disini penulis akan mencoba meneliti pola kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat secara langsung dalam pembangunan kampung keramat tersebut.

## **B. Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan**

Secara Umum berdasarkan pendapat Dwiyanto dalam Ni Luh Yulyana Dewi menjelaskan bahwasannya Kerjasama Kolaborasi dapat terjadi karena proses penyamaan satu Visi, Tujuan, Strategi maupun kegiatan antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama yang memiliki otoritas tinggi dalam pengambilan keputusan secara independen. dan bahkan para pihak ini juga memiliki otoritas

dalam mengelola sebuah organisasi walaupun sebenarnya mereka mengikuti dan tunduk terhadap kesepakatan bersama.<sup>43</sup>

Ansell dan Gash mengatakan bahwa Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan (*collaborative governance*) merupakan serangkaian aturan yang mana pemerintah sebagai lembaga tertinggi di suatu negara melibatkan secara langsung berbagai aktor, baik dalam pengambilan keputusan yang bersifat musyawarah mufakat, memiliki tujuan dalam mencapai kesepakatan bersama, membuat atau melaksanakan kebijakan publik dan memanfaatkan segala asset publik.<sup>44</sup>

Menurut pendapat Ansell dan Gash mengenai *collaborative governance*, kedua pakar tersebut menjelaskan bahwasannya *collaborative governance* merupakan sebuah aturan maupun cara yang mana pemerintah sebagai lembaga yang memiliki otoritas tinggi ingin melibatkan berbagai aktor yang ada untuk terlibat langsung dalam pengelolaan publik. Baik itu mulai dari proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat, membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik secara bersama, dan sampai pada memnfaatkan segala sarana dan prasarana publik secara bersama pula. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya pada penelitian yang dilakukan Ansell dan Gash ini dapat menghasilkan sebuah model alternatif yang berbentuk model pengelolaan kelembagaan yang berbasis Collaborative Governance.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ni Luh Yulyana Dewi, 2019. *Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 3 No. 2 E-ISSN: 2581-2424 Hal. 204

<sup>44</sup> Crish Ansell dan Gash, "*Collaborative Governance in Theory and Practice*", *Journal of Public Administration Research and Theory*. JPART 18: 544

<sup>45</sup> Denok, Paulus dan Imron. 2017. *Collaborative Governance dalam Penguatan Kelembagaan Progam Santasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 19 No. 1 Maret 2017 : 1-7 Hal. 3

Ansell dan Gash mendefinisikan Collaborative Governance menjadi 6 macam kriteria, diantaranya adalah pertama, Forum tersebut dijalankan oleh keinginan Institusi Publik. kedua, para peserta partisipan yang hadir dalam forum tersebut harus terdapat aktor nonpemerintah. Ketiga, partisipan tersebut harus terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Keempat, Forum tersebut tersebut harus terorganisir secara formal dan forum tersebut harus dilaksanakan secara rutin. Kelima, segala kebijakan yang ada harus berdasarkan kesepakatan bersama. Keenam, collaborative governance ini memfokuskan pada kebijakan publik atau manajemen publik.<sup>46</sup>

Penjelasan mengenai hubungan antara pemerintah, masyarakat, maupun swasta juga ditekankan dalam konsep good governance, yakni bahwasannya terdapat tiga pilar yang menjadikan bangsa ini memiliki kemampuan untuk menjadi good governance, yaitu : Pemerintah, Masyarakat, maupun masyarakat pengusaha.<sup>47</sup> (Surjadi:2009:21)

Ladzi Safroni (2012:211) mengatakan bahwa walaupun peran negara tidak semenah-menah untuk di biarkan dan juga peran masyarakat tidak juga dibiarkan begitu saja, maka keseimbangan peran diantara kedua aktor tersebut harus sangat diperlukan. Adapun terdapat satu aktor lagi yang juga perlu untuk dipertimbangkan dalam upaya proses penyelenggaraan pelayanan publik ini yakni, *Corporate* atau Perusahaan. Dari ketiga aktor inilah yang menjadi pilar

---

<sup>46</sup> Dimas Luqito, 2017. COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Administrasi Negara. Hal. 6

<sup>47</sup> Surjadi. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2009, Hlm-21



dalam pelaksanaan pelayanan publik yang demokratis yang kiranya perlu untuk dijaga keseimbangannya.<sup>48</sup>

Mengacu dari penjelasan para pakar diatas mengenai para aktor dapat disimpulkan bahwa ketiga aktor ini memiliki hubungan yang erat dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam urusan publik pemerintah, pihak swasta dan masyarakat perlu untuk dillibatkan dalam urusan tersebut. Baik dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan sarana dan prasarna publik secara bersama-sama dan sampai pada proses pelaksanaan kebijakan publik pun dilakukan secara bersama.

#### **1) Model Collborative governance Ansell dan Gash**

Menurut Ansell dan Gash *dalam* Bagus Nuari Harmawan, Inti Wasiati, dan Hermanto Rohman Mengatakan bahwa Model Collaborative yang ditawarkan oleh Ansell dan Gash terdiri dari beberapa tahap, antara lain<sup>49</sup> :

##### **1. *Starting Condition***

Pada tahap awal ini dalam kaitannya hubungan antara beberapa para aktor yang terlibat, dari masing-masing aktor ini mempunyai kondisi riwayat yang berbeda-beda. perbedaan inilah yang menjadikan hubungan para aktor tersebut saling terikat dalam membangun sebuah kerjasama. perbedaan ini biasanya terjadi karena perbedaan kepentingan sehingga terjadilah konflik antar beberapa aktor

---

<sup>48</sup> Safroni, Ladzi. MANAJEMEN dan REFORMASI Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Malang, Aditya Media Publishing, Cetakan Pertama, 2012, Hlm-211

<sup>49</sup> Bagus Nuari Harmawan, Inti Wasiati, dan Hermanto Rohman. "Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival". Jurnal E-Sospol, Vol. IV. Hal. 50-51

yang pada akhirnya perbedaan tersebut mendorong mereka untuk melakukan kerjasama.

## **2. Kepemimpinan Fasilitatif**

Menurut pendapat Syamsul Arifin dan Utami Dewi dalam jurnalnya menjelaskan bahwasannya kepemimpinan fasilitatif memegang peranan yang sangat penting dalam proses *collaborative governance*. Hal ini memiliki arti penting dalam membawa para stakeholder secara bersama-sama untuk melibatkan mereka secara langsung dalam program yang mereka buat tersebut. hal ini bertujuan sebagai sebuah semangat dalam kerjasama.<sup>50</sup>

Terdapat tiga macam bentuk kepemimpinan kolaborasi yang efektif antara lain,

- a. Terdapat proses manajemen yang memadai terhadap proses kolaborasi yang dijalankan.
- b. Terdapat kemampuan untuk mengelola pelaksanaan teknis dalam proses kolaborasi.
- c. Untuk meyakinkan diantara beberapa para aktor yang terlibat bahwa kolaborasi tersebut dapat dipergunakan dalam membuat segala keputusan yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

## **3. Desain Institusional (*Institutional Design*)**

Ansell dan Gash menjelaskan bahwasannya Institutional Design merupakan standar maupun aturan pokok sebagai prasyarat terjadinya kolaborasi. Dalam institusional desain ini lebih menekankan pada aspek aturan prosedural yang

---

<sup>50</sup> Syamsul Arifin dan Utami Dewi. 2018. Collaborative Governance dalam Program Rintisan Desa Inklusif di Desa Sendangadi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman. Jurnal Administrasi Negara. Hal. 323

berlaku. Artinya yang lebih ditekankan disini adalah bahwa pemerintah sebagai aktor tertinggi dalam memfasilitasi aktor lain harus bersifat terbuka dan dapat menerima dengan bijak perbedaan yang ada.

Adapun menurut De Save dalam Darmo menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan dalam collaborative governance adalah kejelasan mengenai siapa saja anggota yang terlibat dalam kerjasama, terdapat aturan-aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dan juga menjadi dasar dalam pelaksanaan kerjasama.<sup>51</sup>

#### **4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)**

Perlu kita ketahui bahwa proses kolaborasi disini dapat digambarkan sebagai Tahapan yang harus dilalui sebagai prasyarat Terjadinya Kolaborasi. Adapun Tahapan Proses Kolaborasi tersebut antara lain<sup>52</sup> :

##### **a. *Face To Face* (Dialog Tatap Muka)**

Face To Face merupakan kegiatan dialog tatap muka antara berbagai pihak aktor yang terlibat dalam satu tempat dan pada waktu yang bersamaan, sehingga diantara para aktor tersebut terjadinya saling interaksi satu sama lain dalam membahas suatu kepentingan bersama. Dialog tatap muka ini biasanya terjadi dalam sebuah forum musyawarah resmi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi tersebut. didalam forum msuyawarah tersebut para pihak yang terlibat saling bertukar pikiran dan mempunyai kepentingan satu sama lain,

---

<sup>51</sup> Sudarmo. (2011). Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Solo: Smart Media.

<sup>52</sup> Giat Tri Sambodo dan Ulung Pribadi. 2016. *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik.. Vol. 3. Hal. 103

namun dengan catatan masih dalam satu garis tujuan yang sama dalam kolaborasi yang mereka bangun tersebut.

**b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)**

Membangun Kepercayaan merupakan hal yang penting dalam proses kolaborasi. Membangun kepercayaan ini tercipta karena diantara berbagai pihak aktor yang terlibat mempunyai niatan yang sama terhadap kepentingan yang akan dilaksan secara bersama-sama. Membangun sebuah kepercayaan diantara para pihak yang terlibat dalam kolaborasi tersebut menjadi suatu prasyarat agar tujuan yang ingin mereka capai dalam kolaborasi tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang diinginkan.

**c. *Commitment To Process* (Komitmen Terhadap Proses)**

Commitment To Process Merupakan sebuah komitmen yang dibangun secara bersama oleh Para Aktor yang terlibat Terhadap suatu Proses yang akan dicapai dan ingin dijalankan secara bersama-sama. Tindakan saling berkomitmen satu sama lain ini merupakan tindakan yang saling menggantungkan satu sama lain dalam mengatasi dan mencari solusi atas suatu problematikan yang terjadi pada saat proses kolaborasi. Hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwasannya proses kolaborasi ini adalah milik bersama, dan saling keterbukaan satu sama lain, sehingga seberat apapun masalah dalam proses kolaborasi ini, masalah tersebut menjadi masalah bersama.

**d. *Share Understanding* (Pemahaman Bersama)**

Share Understanding merupakan tindakan saling pengertian dan saling memahami bersama. Hal ini menegaskan bahwasannya tujuan dari forum



kolaborasi ini adalah merupakan suatu tanggung jawab yang harus diselesaikan secara bersama, mencari permasalahan hingga mencari nilai-nilai dasar dari permasalahan yang terjadi merupakan suatu upaya agar terciptanya saling mengerti dan memahami bersama diantara para aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi.

**e. *Intermediate Outcome* (Hasil Sementara)**

Intermediate Outcome Merupakan Hasil sementara atas proses yang sedang terjadi yang memiliki manfaat dan nilai yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Artinya hasil sementara ini merupakan hasil kemajuan yang sudah tercapai sementara, sehingga hasil tersebut walaupun sementara, akan tetapi sudah memberikan manfaat dan nilai guna.

**C. Pengembangan Pariwisata**

**1. Pengertian Pariwisata**

Pengertian pariwisata Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 menyatakan bahwa pariwisata adalah sebagai bentuk kegiatan yang memiliki beraneka ragam wisata serta didukung dengan berbagai sarana dan prasarana yang khusus disediakan oleh masyarakat, pemerintah, pengusaha maupun pemerintah daerah.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Hunziker dan Kraft (1942) dalam Muljadi A.J mengatakan bahwa Pariwisata merupakan Keseluruhan dari hubungan maupun gejala-gejala yang disebabkan dari adanya warga Asing yang perjalanannya tersebut tidak dimaksudkan untuk menetap dan juga tidak ada memiliki hubungan dalam rangka mencari pekerjaan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Buku Perundang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Jakarta, Redaksi Sinar Grafika

<sup>54</sup> Muljadi A.J. KEPARIWISATAAN dan PERJALANAN. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, Hlm 8

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan sebuah bentuk kegiatan yang mana didalamnya terdapat berbagai macam kegiatan wisata dan berbagai sarana dan prasarana penunjang wisata yang mana orang-orang yang berkunjung tersebut bukan dalam rangka untuk bekerja akan tetapi para pengunjung tersebut benar-benar ingin menikmati sarana dan prasarana wisata yang disediakan oleh berbagai macam aktor, meliputi Masyarakat, Pengusaha maupun Pemerintah daerah setempat.

## **2. Jenis-Jenis Pariwisata**

Perlu kita ketahui bahwa pariwisata memiliki beberapa jenis yang sangat beragam. Hal ini dimaksudkan dalam hal menambah daya tarik para wisatawan yang ingin berkunjung di tempat wisata tersebut. Hampir disetiap daerah yang ada di Indonesia memiliki beberapa jenis-jenis pariwisata yang berbeda-beda.

Menurut James Spillane (1986:28) mengatakan bahwa jenis-jenis pariwisata diantaranya adalah :

### **a. Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Torism*)**

Jenis dari pariwisata ini adalah bagi orang-orang yang meninggalkan rumah mereka dalam rangka untuk berlibur sejenak untuk mencari udara segar, untuk memuaskan keinginan tahunya, untuk menghilangkan stress, untuk melihat hal-hal baru, untuk menikmati pesona alam yang indah ataupun untuk mencari ketentraman dan ketenangan di daerah luar kota.

### **b. Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)**

Jenis pariwisata ini adalah jenis pariwisata yang mana seseorang tersebut ingin memanfaatkan masa-masa diwaktu liburnya untuk istirahat, untuk

memulihkan kondisi fisik maupun jiwanya, dan sekedar untuk menghilangkan rasa lelah maupun letihnya setelah bekerja keras.

**c. Pariwisata Untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)**

Jenis pariwisata ini merupakan jenis pariwisata yang dilakukan karena keinginan dari seseorang untuk mempelajari adat istiadat, kultur, kelembagaan maupun untuk mempelajari cara hidup masyarakat di daerah tersebut. Kemudian selanjutnya untuk berkunjung ke monumen sejarah dari peninggalan zaman dahulu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, dan dalam rangka untuk mengitukti event-event seni music seperti theater, seni tari rakyat, dan lain sebagainya.

**d. Pariwisata Untuk Olahraga (*Sports Tourism*)**

Jenis pariwisata ini terdapat dua macam :

1. ***Big Sport Event***, adalah merupakan jenis pariwisata yang dilaksanakan oleh seseorang yang terjadi pada saat event-event olahraga dalam ruang lingkup besar, seperti halnya *Olympiade Games*, *World Cup* dan lain sebagainya.
2. ***Sporting Tourism of the Participant***, adalah jenis pariwisata yang berkategori sebagai pariwisata olahraga yang diperuntukkan bagi orang yang ingin berkunjung untuk berlatih dan mempraktekkan diri mereka sendiri seperti contoh kegiatan mendaki gunung, olahraga menunggang kuda dan lain sebagainya.

**e. Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)**

Jenis wisata ini adalah merupakan jenis wisata yang dikhususkan bagi para pengusaha Travelling atau biro perjalanan yang mana mereka ingin

melakukan usaha mereka demi suatu pekerjaan ataupun jabatan yang tidak terikat memberikan tawaran tempat tujuan maupun waktu kepada pelaku yang ingin menggunakan jasa ini. artinya bahwa para pengusaha travelling ini keberangkatannya tergantung kepada pilihan pelanggan sendiri, baik mengenai tempat tujuan maupun waktu yang diinginkannya.

**f. Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)**

Jenis pariwisata ini adalah jenis yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk menghadiri sebuah konvensi atau dapat diistilahkan menghadiri sebuah rapat yang berskala besar. Artinya konvensi tersebut dihadiri oleh ratusan orang bahkan sampai ribuan yang menghadiri pertemuan tersebut. Namun orang yang berwisata untuk konvensi ini tidak berlangsung lama. Orang tersebut hanya tinggal beberapa hari saja di sebuah kota atau negara yang dia kunjungi untuk menghadiri sebuah konvensi.

**3. Pengembangan Wisata**

Pengembangan wisata merupakan suatu kebutuhan penting dalam peningkatan kebutuhan bagi masyarakat. Berbagai sarana dan prasarana penunjang wisata maupun daya tarik merupakan hal yang penting sebagai kebutuhan dalam pengembangan wisata.

Dalam pengembangan wisata tersebut terdapat istilah aspek 4A, yaitu diantaranya :

**a. *Attraction* (Daya Tarik)**

Menurut Suwena (2010:88) *dalam* Khusnul Khotimah, Wilopo, dan Luchman Hakim menjelaskan bahwasannya *Attraction* merupakan sebuah



komponen yang penting dalam menarik perhatian wisatawan agar mereka tertarik untuk mengunjungi tempat wisata yang telah disediakan.<sup>55</sup>

Adapun sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata (Attraction) adalah dengan modal atau sumber kepariwisataan. Adapun modal atraksi yang dapat menarik kedatangan pengunjung yaitu ada tiga macam :

1. Natural Resources (alami) contohnya adalah terdapat gunung, pantai, bukit, maupun danau.
2. Atraksi Wisata Budaya, contohnya adalah terdapat arsitektur rumah bernuansa tradisional di daerah tersebut, situs arkeologi, seni maupun kerajinan, festival ritual, kehidupan masyarakat tiap hari, makanan khas daerah tersebut dan keramahtamahan.
3. Atraksi Buatan contohnya ajang olahraga, perbelanjaan, konferensi, pameran dan lain sebagainya.

**b. *Accesibility* (Aksesibilitas)**

Menurut Sunaryo (2013:173) *dalam* Khusnul Khotimah, Wilopo, dan Luchman Hakim menjelaskan bahwasannya Accesibilty merupakan sebuah sarana yang diperuntukkan bagi para wisatawan dalam rangka dalam memberikan kemudahan dalam mencapai tempat tujuan atau destinasi wisata yang diinginkan. Adapun Accesibility yang disediakan adalah meliputi papan penunjuk arah tujuan, bandara, terminal, waktu yang diperlukan, ongkos

---

<sup>55</sup> Khusnul Khotimah, Wilopo dan Luchman Hakim. 2017. Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya. Diakses Pada 29 Maret 2019.  
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1657>

perjalanan maupun akses transportasi menuju lokasi destinasi wisata yang dituju.<sup>56</sup>

**c. *Aminities (Fasilitas Pendukung)***

Menurut Sugiama (2011) menjelaskan bahwasannya Amenitas merupakan sekumpulan fasilitas penginapan atau tempat tinggal sementara yang diperuntukkan bagi wisatawan yang sedang mengunjungi tempat wisata. Fasilitas yang disediakan selain tempat penginapan tersebut dapat berupa penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan, tempat perbelanjaan dan lain-lain.<sup>57</sup>

**d. *Ancillary Service***

Menurut Sunaryo (2013:159) *dalam dalam* Khusnul Khotimah, Wilopo, dan Luchman Hakim menjelaskan bahwa Ancillary Service merupakan bentuk ketersediaan fasilitas umum dan sarana yang diperuntukkan bagi para wisatawan untuk menunjang aktivitas kegiatan berwisata mereka. Fasilitas umum dan sara tersebut dapat berupa fasilitas rumah sakit, Mesin ATM, Telekomunikasi, bank dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

**4. Model Pengembangan Pariwisata**

**1. Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)**

Menurut Dewa Putu (2013:87) mengatakan bahwa pengertian partisipasi harus penting kita ketahui karena partisipasi dalam pelaksanaan

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) sangat dibutuhkan peran aktif atau keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat karena keterlibatan masyarakat partisipasi tersebut sangatlah penting dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam pengembangan pariwisata.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Pinel (2007:76) *dalam* Hadiwijoyo (2012:65) mengatakan bahwa Community Based Tourism merupakan model pengembangan wisata yang lebih menegdepankan aspek nilai-nilai kesadaran yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat sebagai cara yang dilakukan dalam membangun pariwisata yang dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat, inisitaif maupun kesempatan bagi masyarakat.<sup>60</sup>

Model pengembangan pariwisata ini merupakan model yang mana dalam pengembangan pariwisata tersebut lebih mengedepankan aspek perlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan maupun pengelolaan pariwisata. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan nilai dan manfaat yang positif bagi masyarakat karena dengan perlibatan aktif masyarakat, tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan pariwisata tersebut dapat tercapai dengan baik.

Menurut Isnaini (2007:8) mengatakan bahwa *Community Based Tourism* juga mempunyai beberapa prinsip yang dapat dipergunakan sebagai *Tool of*

---

<sup>59</sup> Putu Oka Praiasa, Dewa. 2011. *Wacana Kotemporer Pariwisata*, Jakarta, Salemba Humanika

<sup>60</sup> Suryo Sakti, Hadiwijoyo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)* Yogyakarta : Graha Ilmu. Hlm. 65

*Community development* untuk masyarakat local, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>61</sup> :

- a. Mengakui, Mensupport, dan memasarkan pariwisata yang di milki oleh masyarakat
- b. Mengikutsertakan crew masyarakat sejak pertama kali dalam setiap hal
- c. Memasarkan hal yang disukai masyarakat
- d. Menjamin keseimbangan lingkungan
- e. Selalu merawat karakter dan budaya asli yang unik
- f. Membantu mengembangkan cross cultural learning
- g. Tetap menghormati budaya dan martabat manusia
- h. Memberikan profit secara adil diantara elemen masyarakat yang lainnya
- i. Turut menyumbangkan presentase yang telah ditetapkan bagi pemasukan proyek masyarakat

Prinsip –prinsip diatas menjadi pedoman dalam mengembangkan wisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*). Jika prinsip-prinsip diatas benar-benar dapat dijalankan dengan baik maka segala tujuan dan sasaran yang diinginkan akan benar-benar bisa tercapai dengan baik.

---

<sup>61</sup> Muallidin, isnaini. 2007. *Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta*. Diakses Pada 29 Maret 2019.  
[https://www.researchgate.net/publication/320211194\\_MODEL\\_PENGEMBANGAN\\_PARIWISATA\\_BERBASIS\\_MASYARAKAT\\_DI\\_KOTA\\_YOGYAKARTA](https://www.researchgate.net/publication/320211194_MODEL_PENGEMBANGAN_PARIWISATA_BERBASIS_MASYARAKAT_DI_KOTA_YOGYAKARTA).



#### **D. Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata**

Perlu kita ketahui bahwa collaborative governance dalam konteks pengembangan pariwisata merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan agar segala tujuan maupun sasaran yang diinginkan dari pengembangan pariwisata tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Kolaborasi antar berbagai aktor dalam pengembangan pariwisata merupakan suatu alternative untuk mempermudah proses berjalannya pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, agar proses collaborative governance dalam konteks pengembangan wisata dapat berjalan dengan lancar maka perlu untuk mengetahui tahap-tahap dalam proses kolaborasi tersebut.

##### **1. Tahapan-Tahapan Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata**

Menurut Wanna (2008:135) terdapat tahapan-tahapan collaborative governance dalam konteks pengembangan pariwisata, antara lain<sup>62</sup> :

##### **1. Membangun Visi Bersama (*Shared Vision*)**

Membangun visi bersama bagi setiap organisasi maupun kelompok tentunya keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam menggapai tujuan yang ingin dicapai kedepannya. Karena masing-masing memiliki kepentingan yang sama maka tentu setiap organisasi maupun kelompok tersebut mempunyai visi yang jelas dan visioner kedepannya.

---

<sup>62</sup> Triana, Yagus. 2018. *Strategi Impelemntasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran Provinis Jawa Barat*. Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik. Ilmu Sosial. Universitas Pasundan. Diakses Pada 27 April 2019. <http://repository.unpas.ac.id/32473/1/Repository.doc>

Upaya membangun visi bersama dalam suatu kelompok atau organisasi menjadi suatu keharusan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Karena dengan adanya visi atau tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama secara tidak langsung hal ini sebagai bukti bahwa visi yang ingin mereka bangun bersama-sama benar-benar ingin tercapai dengan baik. walaupun masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda-beda namun jika mereka sudah mempunyai komitmen yang tinggi maka tujuan atau visi yang ingin dicapai bersama dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran.

## **2. Partisipasi (*Participative*)**

Pada tahap ini partisipasi setiap aktor sangatlah diperlukan. Begitupun juga dalam pengelolaan pariwisata juga harus mempunyai struktur yang jelas sehingga ketika dalam proses pelaksanaan pengelolaan pariwisata setiap aktor tersebut turut berpartisipasi aktif sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing. Setelah sebuah visi sudah terbangun diantara para aktor maka partisipasi tersebut dapat dimulai secara sukarela tanpa menunggu instruksi terlebih dahulu.

Partisipasi dari berbagai pihak menjadi suatu hal yang sangat penting, khususnya dalam hal kerjasama pengembangan pariwisata perlu adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama. partisipasi aktif tersebut dapat dilakukan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Munculnya partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut tentunya muncul karena pada tahap sebelumnya mereka sudah berkomitmen dalam membangun tujuan bersama yang ingin dicapai. Secara

otomatis jika visi tersebut sudah terbentuk maka partisipasi aktif ini akan muncul karena keinginan mereka bersama dalam mencapai tujuan maupun target yang ingin di capai dalam pengembangan pariwisata tersebut.

### **3. Jejaring (*Network*)**

Setelah melewati tahap partisipasi yang sudah terbentuk diantara setiap aktor, maka untuk menciptakan hubungan harmonisasi yang kuat diantara para aktor yang terlibat maka diperlukan jejaring atau hubungan luas dengan pihak-pihak organisasi luar. Jejaring ini juga mendapatkan pengakuan dari pihak akademisi maupun praktisi sebagai cara membangun hubungan yang bersifat multi-organisasi.

Membangun jejaring dari berbagai pihak luar merupakan sebuah peluang bagi setiap organisasi ataupun kelompok dalam memperjuangkan kesuksesan tujuan yang ingin mereka capai. Bahkan dalam konteks pengembangan pariwisata pun sangat diperlukan adanya hubungan yang kuat dengan pihak organisasi atau kelompok luar. hal ini akan memberikan peluang bagi para pihak pengembang pariwisata karena mereka dapat dukungan penuh dari pihak luar sehingga pihak luar ini secara otomatis akan mensupport dalam pengembangan pariwisata tersebut, baik dalam hal financial maupun dalam hal dukungan kerjasama. oleh karena itu jejaring ini dapat dikatakan sebagai salah satu prasyarat kesuksesan pengembangan pariwisata yang ingin dicapai tersebut.

#### **4. Kemitraan (*Partnership*)**

Tahap selanjutnya adalah kemitraan menjadi suatu hal yang sangat penting. Setelah melewati serangkaian tahap diatas maka kemitraan ini muncul sebagai salah satu upaya membangun kerjasama dalam pengembangan pariwisata. Kemitraan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan berbagai hal, khususnya dalam pengembangan pariwisata. Karena dengan adanya kemitraan dalam pengembangan pariwisata akan semakin mempermudah dalam berbagai hal. Salah satu contohnya adalah menjalin kemitraan dengan pihak travelling. Dengan adanya pihak travelling dari luar maka akan semakin mempermudah akses para wisatawan untuk datang ke tempat tujuan wisata.

Oleh karena itu kemitraan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam pengembangan pariwisata karena akan memberikan manfaat yang lebih dalam pengembangan pariwisata tersebut. disamping itu antara berbagai pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut akan sama-sama diuntungkan satu sama lain.

#### **E. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata**

Perlu diketahui bahwasannya undang-undang yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata terdapat tiga pasal yang perlu penulis uraikan :



**a. Bab IV tentang Urusan Pemerintah Bagian kesatu Pasal 9 ayat 3 dan 4**

Pasal 9 ayat 3 tersebut berbunyi “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota”.<sup>63</sup>

Sedangkan pada ayat ke 4 tersebut berbunyi “Urusan Pemerintah Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”.<sup>64</sup>

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwasannya urusan pemerintah Konkuren merupakan urusan yang terbagi antara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan pemerintah Daerah Provinsi maupun kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Namun dalam ayat ke 4 ditekankan lagi bahwa urusan pemerintahan konkuren diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah.

**b. Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 3**

Pada bagian ketiga pasal 11 ayat 1 ini berbunyi “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib urusan pemerintahan pilihan.”<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid. Hlm 11

Sedangkan pada pasal ke 12 ayat 3 tersebut berbunyi “Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 meliputi<sup>66</sup> :

- a) Kelautan dan Perikanan
- b) Pariwisata
- c) Pertanian
- d) Kehutanan
- e) Energi dan Sumber Daya Mineral
- f) Perdagangan
- g) Perindustrian, dan
- h) Transmigrasi

Dari penjelesan pasal 11 tersebut menjelaskan bahwasannya urusan pemerintahan konkuren tersebut terdapat 2 macam yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan dalam pasal 12 tersebut disebutkan pada poin 2 bahwa pada bidang pariwisata menjadi urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah dalam mengatur bidang tersebut. Artinya bahwa dalam pengembangan pariwisata sebenarnya dalam undang-undang ini sudah diatur dan sudah diklasifikasikan berdasarkan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini menjadi dasar atas kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata yang ada di setiap daerah yang ada.

---

<sup>66</sup> Ibid. Hlm 12